



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YASSIERLI
2. Jabatan : MENTERI KETENAGAKERJAAN
3. NHK : 692838

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1751 m2/310 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, LAINNYA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/140 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 882 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1977 m2/40 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **173.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA 2.0 G A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA G A/T Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.276.000.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **8.599.000.000**



III. HUTANG

Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

8.599.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.